Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)
e-ISSN: 2684-8082 Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (122-141) doi: 10.24198/padjir.v1i2.26126

MDGs Sebagai Dasar Strategi Kebijakan Luar Negeri dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional GPEDC

Reyhan Muhammad Fachry
Universitas Padjadjaran, Indonesia; reyhan15003@mail.unpad.ac.id
Dudy Heryadi
Universitas Padjadjaran, Indonesia; dudy.heryadi@unpad.ac.id

Dikirim: 26 Juni 2019 | Direvisi: 30 Juli 2019 | Diterima: 15 Agustus 2019 | Dipublikasikan: 31 Agustus 2019

Keywords
MDGs, GPEDC, International Development Cooperation, Foreign Policy, Knowledge Sharing

ABSTRACT
This study aims to explain how the MDGs became indicators of national development and the application of the MDGs as the basis of Indonesia's foreign policy strategy in international cooperation at the Global Partnership for Effective Development Cooperation facilitated by the knowledge sharing process. In explaining this phenomenon, Toma & Gorman's international cooperation theory was used to explain multilateral cooperation that was functional. This research is also supported by the development concept of Matthew Fielden and David Easton about national development and the relation of development to national interests. This research was conducted with descriptive analysis qualitative research methods, with the form of case studies. The data used in this study was obtained through literature studies and interviews with relevant parties. The results of this study indicate that Indonesia's entry into GPEDC helped progress the achievement of the MDGs in Indonesia through knowledge sharing facilities. This then makes the MDGs the basis of the Indonesian foreign policy strategy, which at the time adheres to the principle of free-active enabling the Indonesian government to work with developing countries to jointly solve the problems that arise in the application of the MDGs. This gives room for the emergence of south-to-south and triangular cooperation in the GPEDC

Kata Kunci
MDGs, GPEDC, Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kebijakan Luar Negeri, *Knowledge Sharing*

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana MDGs sebagai indikator pembangunan nasional dan pengaplikasian MDGs sebagai dasar strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam kerja sama internasional pada *Global Partnership for Effective Development Cooperation* yang difasilitasi oleh *knowledge sharing process.* Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional dari Toma&Gorman yang menjelaskan tentang kerja sama multilateral yang bersifat fungsional. Penelitian ini juga didukung oleh konsep

pembangunan dari Matthew Fielden dan David Easton tentang pembangunan nasional dan kaitan pembangunan dengan kepentingan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif, dengan bentuk studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masuknya Indonesia ke GPEDC membantu progres ketercapaian MDGs di Indonesia melalui fasilitas *knowledge sharing*. Hal ini kemudian menjadikan MDGs sebagai dasar strategi Kebijakan luar negeri indonesia yangkala itu menganut prinsip bebas-aktif memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam penerapan MDGs. Hal ini memberikan ruang untuk munculnya *south-to-south and triangular cooperation* dalam GPEDC.

PENDAHULUAN

Pasca Pasca Perang Dunia II, Hubungan Internasional mulai berfokus pada pembangunan. Hal ini dilandasi oleh adanya keinginan negara-negara di dunia untuk melakukan restorasi terhadap dampak perang dunia II. Diawali dengan pidato presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang menekankan bahwa pembangunan harus berdasarkan azas demokrasi[1]. Kemudian ditandai dengan ditandatanganinya program *Marshall Plan* menandai masuknya pembangunan internasional *(International Development*) sebagai salah satu fokus hubungan internasional (Milward, 2006, p. 46).

Pembangunan internasional membawa pendekatan berbeda dari isu pembangunan tradisional karena secara khusus terdiri dari lembaga, institusi, dan kebijakan yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Lembaga-lembaga ini kemudian memiliki fokus pada pengentasan kemiskinan dan memperbaiki kondisi kehidupan di negara-negara yang awalnya terkena dampak Perang Dunia II hingga meluas menjadi negara-negara dunia ketiga secara umum. Pembangunan internasional ini kemudian memberikan negara-negara dunia ketiga kesempatan untuk menata kebijakan serta strategi pembangunan nasional (So, 1991, p. 17).

Dalam pembangunan nasional sendiri, masuk menjadi fokus hubungan internasional diderivasi dari ilmu ekonomi melalui subkategori ekonomi pembangunan. Fokus dari studi ini adalah untuk menerapkan alat dan pendekatan yang diidentifikasi untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan dari negara-negara berkembang untuk mencapai perbaikan dalam standar hidup (Belkaoui 1994, hal. 2; Todaro 2000, hal. 7). Titik fokus dari studi ekonomi semacam ini adalah mengenai kondisi ekonomi negara-negara berkembang yang mencakup pada pengembangan kebijakan yang bertujuan meningkatkan posisi suatu negara secara ekonomi, sosial dan kelembagaan. Teori Pembangunan dipicu oleh situasi di pertengahan abad ke-20 ketika dekolonisasi terjadi dan tampak kesenjangan ekonomi antara negara-negara Eropa dan negara dunia ketiga (Todaro 2000).

Pada tahun 2000, negara anggota sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menandatangani *Millennium Declaration* atau resolusi sidang umum PBB nomor 55/2. Resolusi ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tinggal di negara berkembang untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak pada tahun 2015. Kerangka

[1] Disampaikan oleh Presiden Truman dalam *Inaugural Adress*, 20 Januari 1949

untuk kemajuan ini diuraikan dalam *Millennium Development Goals*. Juga dikenal sebagai MDGs, berangkat dari poin-poin indikator pembangunan dari Deklarasi Milenium. KTT ini difokuskan pada berbagai isu global, seperti kemiskinan, AIDS, dan pemanfaatan pembangunan melalui globalisasi (UN, 2000).

Sebagai penandatangan Deklarasi Milenium (UN, 2000), pemerintah nasional diharapkan untuk menyusun perundang-undangan untuk menstimulasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan MDGs sebagaimana ditetapkan dalam *'United Nations Framework Towards Millennium Development Goals'* (United Nations, 2001). MDGs sendiri memiliki fokus terhadap tiga hal. Yakni pembangunan manusia, infrastruktur, dan hak asasi manusia. Tiga fokus utama MDGs ini merupakan pedoman umum yang tertera pada 8 poin MDGs. Namun, dalam pelaksanaannya, MDGs dapat menyesuaikan dengan kondisi negara berkait. MDGs melalui Deklarasi Milenium telah menentukan target yang berada di bidang-bidang seperti kesehatan dan pendidikan yang bergantung pada program program lembaga-lembaga pemerintah di sektor terkait. Secara kontekstual, komitmen untuk mensukseskan MDGs datang dari pemerintah nasional dan pemerintah memiliki andil untuk melaksanakan program pembangunan yang berbasiskan MDGs, pada kenyataannya pelaksanaan program pembangunan MDGs lebih banyak dilaksanakan oleh badan publik ataupun badan individu ketimbang pemerintah nasional (Sarwar, 2015).

Dijadikannya MDGs sebagai tujuan utama pembangunan tahun 2000-2015 kemudian memacu negara-negara untuk berfokus pada pencapaian MDGs 2015, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia turut menandatangani deklarasi milenium PBB tahun 2000. Pada masa tersebut, Indonesia masih dalam proses pemulihan dari krisis ekonomi 1997 serta sedang mengalami transisi kekuasaan menuju pemeritahan yang lebih demokratis. Segala hal yang menyangkut MDGs kemudian berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kemudian MDGs sendiri dimasukkan sebagai garis dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan konsentrasi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Masalah kemudian muncul ketika standar pembangunan MDGs yang digunakan oleh Indonesia pada kuartal 2000 hingga 2010 tidak sesuai dengan patokan MDGs Internasional. Rencana nasional dari pemerintah tidak memiliki hubungan langsung dengan implementasi di lapangan. Akibatnya, keputusan yang diambil di tingkat nasional tidak dapat diterjemahkan ke dalam prioritas yang sama di tingkat lokal. Kesenjangan regional dalam indikator pembangunan sosial di seluruh Indonesia juga berarti bahwa prioritas lokal berbeda di seluruh wilayah dan tidak akan selaras secara otomatis dengan prioritas nasional (Sarwar, 2015).

Baru pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi peningkatan fokus politik ke MDGs dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2010 yang memfokuskan MDGs. Sebelumnya, MDGs dipegang oleh berbagai macam *stakeholder*. Terbitnya Inpres ini menyebabkan dibentuknya sekretariat nasional MDGs. Yang kemudian menginstitusionalisasi MDGs pada skala nasional dan mulai memakai patokan internasional untuk memaksimalkan upaya pemerintah untuk mencapai target *Millennium Development Goals* (Sarwar, 2015, p. 10).

MDGs kemudian menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional oleh pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) (Sarwar, 2015). Termaktub pada poin 8 *Millennium Development Goals*, yakni Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan (*Develop a Global Partnership for Development*), MDGs memiliki berbagai macam *platform* untuk mengadakan kemitraan global yang berfokuskan pada pembangunan. Di tahun 2011, negara dunia melalui *4th High*

Level Forum of Aid Effectiveness di Busan, Korea Selatan menyadari bahwa Deklarasi Milenium menetapkan mandat universal untuk pembangunan dan kala itu dengan tengat waktu *Millennium Development Goals* yang tinggal 4 tahun berselang, ditambah adanya urgensi mencapai pertumbuhan yang kuat, berbagi dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak di negara berkembang adalah hal penting. Deklarasi Milenium juga mengidentifikasi bahwa diperlukan perhatian khusus hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan yang baik merupakan bagian integral dari upaya pembangunan. Lebih lanjutnya berfous pada pembangunan di negara-negara yang rentan dan terpengaruh oleh konflik (Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, 2011).

Melihat hal ini, GPEDC kemudian dibentuk sebagai tindak lanjut dari kesepakatan *Busan Outcome Document* yang merupakan hasil dari *the 4th High Level Forum (HLF-4) on Aid Effectiveness* di Busan, Korea Selatan pada tahun 2011. Forum GPEDC merupakan forum inklusif yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan pembangunan (*development stakeholder*) yang berkomitmen untuk mendorong efektifitas kerja sama pembangunan dan berorientasikan pada pencapaian hasil (Blampied, 2016, p. 1).

Kemitraan Global untuk Kerja sama Pembangunan Efektif (GPEDC) didirikan pada tahun 2011 sebagai organisasi penerus yang lebih inklusif untuk proses efektivitas bantuan yang dipimpin *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang dimulai di Paris, pada tahun 2003. Dengan cara ini, GPEDC berusaha untuk lebih mencerminkan pandangan yang diinginkan penerima manfaat dari kerja sama pembangunan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, ketimbang pandangan yang dikenakan pada mereka oleh donor. Tetapi dalam artian lain, GPEDC memiliki sistem kerja *top-down*, dan memberi mereka berbagai indikator. Dan mencoba untuk menilai hal-hal seperti sejauh mana masyarakat sipil telah terlibat dalam dialog pembangunan (Blampied, 2016, p. 1).

Forum Tingkat Tinggi Keempat (HLF) tentang Efektivitas Bantuan di Busan, di mana Kemitraan Global diciptakan, dikatakan telah menandai titik balik dalam keterlibatan negara-negara donor anggota *Development Assistance Community* (DAC) yang bertugas untuk membantu negara-negara berkembang dalam melakukan pembangunan. dengan berbagai aktor yang lebih luas, baik dalam mencapai di luar lembaga bantuan pemerintah dan terlibat dengan pemerintah dari negara-negara berkembang seperti BRICS. Kemitraan Global dibangun di atas berbagai perjanjian dan deklarasi sebelumnya yang dipimpin oleh DAC, termasuk Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan (2005), dan Agenda Aksi Accra (2008), yang di antara tujuan-tujuan lain telah berusaha untuk memperkuat penggabungan pengembangan perspektif negara ke dalam kebijakan bantuan internasional (Blampied, 2016, p. 2).

GPEDC yang seharusnya dibentuk untuk mengefektifkan kerja sama pembangunan, malah mendapatkan masalah antar negara anggota. Masalah yang dibawa justru berkaitan dengan ketidakmampuan negara yang terlibat dalam struktur GPEDC untuk sejalan dengan Perjanjian Busan (Bracho, 2017, p. 18). Indonesia ketika dipilih untuk menjadi Co-chair GPEDC di Bali tahun 2013 memakai kesempatannya untuk memfokuskan acuan kerja GPEDC menjadi *knowledge sharing* yang menitikberatkan pada Kerja sama Selatan-Selatan. walau hal ini sejalan dengan pasal 30 GPEDC yang berbunyi (Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, 2011, p. 9):

> "*The inputs to sustainable development extend well beyond financial co--- operation to the knowledge and development experience of all actors and countries. South--- South and triangular cooperation have the potential to transform developing countries' policies and approaches to service delivery by bringing effective, locally owned solutions that are appropriate to country contexts*."

Namun tidak sejalan dengan ketentuan 14 dari perjanjian Busan di mana, GPEDC sendiri bertujuan sebagai forum pembangunan yang integral dengan agenda pembangunan yang lebih inklusif. Kasus serupa juga dialami oleh Inggris dan Nigeria ketika masing-masing menjadi bagian dari struktur GPEDC. Inggris memfokuskan pada pendekatan kepada sektor swasta, sedangkan Nigeria berfokus pada mobilisasi produk domestik (Bracho, 2017, p. 18).

Millennium Development Goals dan GPEDC bukan hal baru namun menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti *Millennium Development Goals* dan kaitannya sebagai strategi kebijakan luar negeri Indonesia pada kerja sama pembangunan dalam GPEDC. Oleh karenanya, peneliti mengambil beberapa studi terdahulu sebagai pembanding dan penjelas yang berhubungan dengan *Millennium Development Goals* dan GPEDC yang berkaitan dengan kerja sama pembangunan internasional.

Dalam membuat penelitian ini, peneliti kemudian mengacu kepada beberapa sumber studi terdahulu yang dibagi menjadi tiga bidang kaji. Dalam bidang kaji pembangunan dan MDGs, peneliti mengacu pada Fukuda-Parr (2013), Manning (2009), Saith (2006), dan Clemens et al. (2007). Dalam penelitiannya, Fukuda-Parr berpendapat bahwa *Millennium Development Goals* adalah instrumen kebijakan yang kuat dalam tata kelola global karena MDGs menetapkan standar tunggal pembangunan untuk semua negara dan mengabaikan keragaman dalam konteks lokal. Selain itu, mereka dapat dimanipulasi untuk menganalisis kinerja pembangunan, menyederhanakan deskripsi sosial yang kompleks dan menimbulkan tingkat kepercayaan pada apa yang dilaporkan, karena orang-orang memiliki kepercayaan pada angka sebagai sesuatu yang diturunkan secara ilmiah (Fukuda-parr, 2013, p. 17).

PBB dalam langkahnya menurut Fukuda-Parr sangat awas dalam menyajikan MDGs yang diekstraksi dari Deklarasi Milenium untuk menjelaskan bahwa tujuan dan target MDGs memiliki sifat saling terkait dan harus dilihat secara keseluruhan. Mereka mewakili kemitraan antara negara maju dan berkembang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan penghapusan kemiskinan (Fukuda-parr, 2013, p. 18).

Selanjutnya, Richard Manning (2009) dalam penelitiannya menerangkan bahwa MDGs telah menjadi titik acuan utama dalam PBB dan diskursus internasional lainnya tentang kemajuan pembangunan, dan telah terlihat pada tingkat yang berbeda di tingkat nasional baik di negara donor maupun negara berkembang. Tujuan kerangka kerja MDG adalah untuk mendorong kemajuan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin dan dukungan donor dari upaya domestik ke arah yang kurang mementingkan kebijakan yang mendukung fokus yang kuat pada volume bantuan (Manning, 2009, p. 12). Hal ini didukung oleh Saith (2006) dan Clemens et al. (2007). Bahwa dalam upaya menciptakan insentif untuk pengembangan pembangunan yang lebih progresif, kerangka kerja MDGs jatuh tepat dalam tradisi yang panjang dan kontroversial dalam menetapkan sasaran yang menuntut negara di tingkat internasional dengan harapan mengubah hasil dunia nyata ke arah yang positif (Clemens, Kenny, & Moss, 2007). Yang membuat kerangka kerja MDG sangat menarik menurut Saith adalah bahwa ia telah mencapai visibilitas yang jauh lebih besar daripada sebagian besar upaya pembentukan indikator pembangunan global sebelumnya (Saith, 2006).

Hal lain yang dikemukakan oleh Manning adalah bahwa ada kekurangan konsistensi mengenai apakah Tujuan MDGs harus berlaku secara universal untuk negara-negara berkembang secara keseluruhan, atau untuk masing-masing negara dan wilayah tanpa memandang tingkat kesenjangan ekonomi. Banyak bantuan ekonomi yang lebih dikhususkan oleh negara maju dengan dalih mendukung kemajuan pembangunan yang ada di negara berkembang (Manning, 2009, p. 15).

Selanjutnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia untuk pembangunan dengan rentang waktu tahun 2000-2015 menyesuaikan jangka waktu MDGs. Penelitian tersebut adalah penelitian dari Eskenazi (2015), Shofi (2003), Nur Alami (2016), Windiani (2009), dan Umar (2013). Eskenazi (2015) dalam penelitiannya berargumen bahwa paradigma kebijakan luar negeri adalah cara pembuat kebijakan memandang tujuan kebijakan luar negeri negara mereka dan posisi politik dan militer negara mereka dalam komunitas internasional. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan paradigma kebijakan luar negeri berfungsi sebagai penghubung antara banyak komponen kebijakan yang berbeda. Strategi kebijakan luar negeri kemudian mewakili strategi besar negara, yang menyelaraskan kebijakan luar negeri dan domestik, memajukan kepentingan negara dalam interaksi dengan kebijakan negara lain dalam sistem internasional, dan membantu alokasi sumber daya antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan jangka panjang (Eskenazi, 2015, p. 2).

Selanjutnya, Shofi (2003), Nur Alami (2016), Windiani (2009), dan Umar (2013) berpendapat dalam penelitannya masing masing bahwa Politik Luar Negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini juga terlihat jelas pada implementasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) yang tampak memiliki karakteristik dan gaya berbeda-beda pada masing-masing periode pemerintahan. pada Orde Reformasi PLNRI memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara serta bergaya Aktif-Diplomatis (Windiani, 2009, p. 2).

Kebijakan luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional. Kebijakan luar negeri Indonesia ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional Indonesia. Era Susilo Bambang Yudhoyono, tercipta banyak kemitraan Kemitraan ini difokuskan untuk memperkuat kerja sama politik dan keamanan, memperdalam kerja sama ekonomi dan pembangunan, meningkatkan kerja sama sosial budaya dan memperluas hubungan non-pemerintah (Shofi, 2003, p. 48). Umar (2013) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa pembuatan keputusan politik luar negeri di Indonesia selalu memiliki basis material yang bersumber dari kebutuhan sebuah negara untuk bertahan. Penelitian Umar ini membuktikan bahwa pembangunan sebagai sebuah langkah real negara untuk menghidupi dirinya dalam bertahan hidup dalam realitas politik internasional memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik luar negeri. Hal ini diamati melalui pilihan untuk membangun perekonomian yang seringkali berujung pada masuknya sebuah negara ke kubu-kubu politik tertentu untuk mendapatkan ‘bantuan’ *(aid)* (Umar, 2013, p. 2).

Selanjutnya, berkaitan dengan GPEDC, peneliti merujuk pada penelitian terdahulu milik Bracho (2017) dan Abdel-Malek (2015). Bracho dalam penelitiannya berpendapat bahwa GPEDC pada awalnya berawal dari situasi "status quo" di mana hanya donor DAC yang terikat oleh komitmen "efektif". Kemudian ketika negara donor yang berasal dari poros selatan datang (Brazil, India, China) terdapat ketegangan antar negara. Kemudian terdapat beberapa pertimbangan terkait status GPEDC: a) satu di mana status quo berlaku; b) yang lain di mana donor selatan bergabung dengan komitmen penuh yang setara; c) sepertiga di mana penyedia Selatan bergabung dengan komitmen berbeda dan; d) pertimbangan terakhir di mana para donor menghindar dari komitmen mereka. Kepatuhan terhadap komitmen-komitmen tersebut dianggap memerlukan biaya akan peluang dalam hal “*national benefits*” yang hilang (Bracho, 2017, p. 17).

Menurut Bracho dalam kasus GPEDC ini menunjukkan bahwa ketika kepentingan nasional diprioritaskan, partisipasi negara penerima yang kepentingan nasionalnya berupa mendapatkan bantuan yang lebih besar. terjadi bersamaan dengan kebaikan bersama, cenderung mendukung hasil pertimbangan yang berbeda tergantung dengan negara penyokong mereka (Bracho, 2017, p. 18). Selanjutnya, dalam bukunya, Abdel-Malek (2015) menjelaskan bahwa dalam konflik GPEDC yang paling dirugikan adalah negara berkembang. Korban nyata dari jenis pengaruh politik dan konfrontasi kekuasaan di antara negara donor adalah negara-negara berkembang, terutama yang secara signifikan bergantung pada bantuan asing (Abdel-Malek, 2015).

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah dengan melihat *Millennium Development Goals* sebagai indikator pembangunan nasional yang diambil dari kerangka pembangunan global. Kemudian diturunkan menjadi kepentingan nasional Indonesia dalam wujud RPJMN. Lebih lanjut menjadi acuan untuk kebijakan luar negeri Indonesia yang kemudian menjadi strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam GPEDC.

METODE RISET

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif deskriptif analitis. Penelitian ini diawali dengan adanya analisa data secara deduktif berupa penafsiran makna-makna pada data yang diperoleh dari tema umum untuk kemudian dibuat hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber guna mendapatkan data primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada bulan September 2000, 189 negara menandatangani Deklarasi Milenium PBB [A / RES / 55/2] yang berkomitmen untuk secara bersama-sama memberantas kemiskinan ekstrem dalam semua bentuknya di tahun 2015. Untuk membantu melacak kemajuan menuju komitmen bersama ini, serangkaian poin yang memiliki tenggat waktu dan target yang terukur diciptakan dengan nama “Tujuan Pembangunan Milenium” (*Millennium Development Goals*) (United Nations, 2000) , yang kemudian dikembangkan untuk memerangi kemiskinan dalam banyak dimensi, termasuk mengurangi kemiskinan pendapatan, kelaparan, penyakit, degradasi lingkungan dan diskriminasi gender.

Pada awalnya, KTT Milenium 2000 diluncurkan atas dasar laporan Sekretaris Jenderal PBB berjudul, "*We the Peoples: The Role of the United Nations in the Twenty-First Century*". Berbagai masukan disiapkan oleh Forum Milenium, yang menyatukan perwakilan “lebih dari 1.000 organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil dari lebih dari 100 negara. Forum ini terjadi pada bulan Mei untuk memberikan hasil dari proses konsultasi dua tahun yang mencakup isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia dan perlindungan bagi yang memerlukan” (Clemens, Kenny, & Moss, 2007). Hal ini kemudian yang membantu MDG muncul dari target pembangunan sebelumnya, di mana para pemimpin negara anggota untuk mengadopsi *millennium declaration* yang telah disetujui di PBB. Persetujuan Deklarasi Milenium adalah hasil utama dari KTT Milenium berupa tujuan pembangunan millenium. “Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki martabat; dan karenanya, hak atas kebebasan, kesetaraan, standar hidup dasar yang mencakup kebebasan dari kelaparan dan kekerasan dan mendorong toleransi dan solidaritas. MDG menetapkan target dan indikator konkret untuk pengurangan kemiskinan untuk mencapai hak-hak yang tercantum dalam deklarasi” (UN, 2000).

MDG poin pertama menargetkan orang miskin secara langsung - mereka yang berpenghasilan dibawah USD 1, sementara

enam berikutnya fokus pada penyebab kemiskinan yang mendasarinya, seperti kurangnya akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan; ketidaksetaraan jender; kondisi perumahan tempat tinggal yang kurang memadai; dan degradasi lingkungan. Tujuan kedelapan adalah mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, dan berfokus pada bagaimana negara-negara industri dapat bekerja dengan negara-negara miskin untuk meningkatkan standar hidup.

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah janji terbesar dunia mengenai sebuah perjanjian global untuk mengurangi kemiskinan dan kekurangan akan kebutuhan pokok bagi manusia pada tingkat historis yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui tindakan multilateral kolaboratif. MDGS berbeda dari kebanyakan upaya global lainnya untuk pengurangan kemiskinan dalam sifat komprehensif. MDGs memiliki upaya yang sistematis dalam hal, membiayai, mengimplementasikan, memantau dan mengadvokasi tujuan tersebut. Sementara banyak ide berbeda telah mempengaruhi bentuk dan isi MDGs, terdapat setidaknya dua ide spesifik yang ditawarkan oleh MDGs yakni, pengembangan manusia dan manajemen berbasis hasil (*Results based management)*, diidentifikasi memiliki signifikansi tertentu dalam mencapai target MDGs.

Dalam pembuatannya, MDGs sendiri memiliki indikator per-poin tujuan pembangunan. Indikator ini memiliki standar global yang kemudian disesuaikan dengan keadaan nasional negara target MDGs. Dalam praktiknya, indikator ini dapat menjadi acuan untuk program *monitoring* pembangunan yang dilaksanakan oleh badan badan berkait, misalnya GPEDC. Indikator ini digunakan untuk mengukur laju pembangunan yang menjadi acuan MDGs

MDGs bukanlah konsep baru di Indonesia. Sebagai kerangka kerja untuk pembangunan, MDGs, dalam arti tertentu, selalu menjadi fokus Pemerintah termasuk pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Berbagai program dan kebijakan pembangunan yang mencerminkan keadaan yang lazim pada waktu itu telah dirumuskan dan dilaksanakan. Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, Pemerintah menerbitkan dokumen untuk perencanaan pembangunan yang berjudul Garis Besar Perencanaan Pembangunan Lima Tahun periode 1956-1960 dan Prinsip Keseluruhan Rencana Pembangunan Nasional periode 1961-1969. Melihat lebih dekat pada rencana pembangunan ini menunjukkan kemiripan dengan tujuan dan sasaran MDGs.

Dari tahun 1956-1960 Pemerintah telah berusaha meningkatkan pendanaan untuk kesejahteraan rakyat (Biro Perencanaan Negara, 1956: 8). Berbagai kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Periode dari 1961 hingga 1969 menyaksikan peningkatan fokus pada pertumbuhan nasional dan pendapatan rumah tangga (Depernas RI, 1961: Bab 8). Meningkatkan sumber daya manusia melalui pengembangan masyarakat, pendidikan, dan kesejahteraan diuraikan dalam Rencana Pembangunan Nasional Delapan Tahun (Penasbede, 1961-1969). Tampaknya pentingnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara ini diakui jauh sebelum MDGs disepakati sebagai komitmen global. Sayangnya, intervensi untuk mewujudkan hasil pembangunan ini sangat terganggu akibat krisis politik pada tahun 1965.

Sejak 1970, pemerintah telah meluncurkan kembali program kesejahteraan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, kesehatan reproduksi, dan pengentasan kemiskinan. Ini dilakukan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun atau REPELITA, terutama selama fase REPELITA I-IV, yang dilakukan melalui program sektoral dan regional. Selama REPELITA V-VI, pemerintah melaksanakan program-program

yang konsisten dengan MDG yang bertujuan untuk menghapus ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Upaya dilakukan untuk mensinergikan program-program baik secara sektoral maupun regional. Implementasi REPELITA V-VI terganggu karena krisis politik dan ekonomi yang sangat besar pada tahun 1997.

Menjelang akhir abad ke-20, Indonesia mengalami transisi besar. Kebijakan pembangunan pada periode ini (1998-2000) dapat dikategorikan sebagai transisi. Kebijakan yang mendukung MDGs termasuk implementasi program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah untuk pengurangan kemiskinan. Dapat dikatakan bahwa implementasi berbagai kebijakan pembangunan dalam 40 tahun terakhir konsisten dengan tujuan MDGs, meskipun MDGs belum dikonseptualisasikan secara formal dan dimasukkan dalam agenda pembangunan global sebelum tahun 2000. Pada tahun 2004, Indonesia menyiapkan Rencanca Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk periode 2004-2009 yang memberikan garis besar rencana tahunan pemerintah di masa depan (RKP) dari tahun 2004 hingga 2009. Secara umum, mempromosikan pembangunan manusia dan delapan MDG telah memberikan latar belakang untuk persiapan RJPMN 2004-2009 serta RKP.

Pada awal dijalankannya MDGs, Indonesia sendiri masih dalam tahap *recovery* dari Krisis Moneter Asia tahun 1997/1998. Pemerintah masih berupaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dalam ketidakpastian kondisi ekonomi dunia saat itu, Indonesia telah perlahan-lahan bangkit dalam pembangunan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mencapai MDGs. Guna memaksimalkan upaya pemerintah dalam mencapai target MDGs, pemerintah membentuk sekretariat nasional yang dilandasi oleh Inpres No.3 Tahun 2010. Sekretariat nasional ini didirikan untuk membantu akselerasi tercapainya MDGs. Sekretariat ini memiliki komposisi beragam dari berbagai macam *stakeholder* yang memaksimalisasi tercapainya indikator MDGs. Misalnya kementerian, akademisi dan organisasi internasional. Dalam perjalanannya, sekretariat ini bekerja sama dengan sinergis dengan UNDP (*United Nations Development Programme)* yang bertugas untuk merancang kebijakan dan proyek-proyek strategis pembangunan pemerintah yang sesuai dengan MDGs.

Selain itu, pemerintah juga memfokuskan pengentasan kemiskinan sebagai fokus utama dari MDGs. Isu-isu kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan menjadi isu sentral MDGs yang diutamakan oleh pemerintah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pemerintah Indonesia berfokus pada pengentasan kemiskinan sebagai poin utama MDGs. Dalam mencapai poin ini, pemerintah Indonesia banyak melakukan kerja sama Internasional dengan beberapa negara salah satunya adalah Kerjasama bilateral Indonesia dan Australia ini dimulai pada tanggal 4 April 2005 dengan ditandatanganinya *Comprehensive Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk membantu kedua negara untuk mencapai target pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan sesuai dengan pencapaian target-target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Indonesia. Yang hasilnya diharapkan dapat sejalan dengan tujuan pertama dalam target *Millennium Development Goals* (MDG).

Untuk mencapai indikator MDGs, pemerintah Indonesia sangat aktif untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional ataupun negara lain. Kerja sama ini dipandang sebagai hal yang esensial karena dapat membantu pemerintah untuk membantu menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam upaya pemerintah mencapai MDGs. Adanya kerja sama dengan pihak lain memungkinkan untuk terjadinya *knowledge sharing* dengan pihak lain tentang bagaimana menghadapi masalah yang serupa. Salah satu

bentuk kerja sama yang dilakukan secara multilateral oleh Indonesia adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam *Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)*.

GPEDC didirikan berdasarkan Deklarasi Kemitraan Busan 2011. Perannya adalah untuk memantau implementasi komitmen Busan dan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan berbagi pelajaran yang dipetik, dan juga untuk mendukung implementasi di tingkat negara. Dipimpin oleh tiga ketua bersama, GPEDC mengadakan pertemuan pleno tingkat tinggi pertamanya pada bulan April 2014 dan akan bertemu lagi di tingkat itu setiap dua tahun. Pertemuan rutin biasanya dilakukan di bawah kepemimpinan ketua bersama dan *steering committee* yang beranggotakan 21 orang. Badan ini terdiri dari perwakilan dari pemerintah nasional, sektor swasta, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, bank pembangunan multilateral, dan organisasi internasional publik. Dua anggota, Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Komite Bantuan Pembangunan OECD (DAC), juga berfungsi sebagai sekretariat bersama.

Meskipun GPEDC didirikan di Busan pada tahun 2011, asalnya dapat ditelusuri kembali ke Konferensi Pembiayaan untuk Pembangunan PBB (FfD) yang diadakan di Monterrey pada tahun 2002. Antara tahun 2002 dan 2011, tiga Forum Tingkat Tinggi (HLF) tentang Efektivitas Bantuan - diadakan di Roma (2003), Paris (2005) dan Accra (2008) - menyediakan platform yang diperlukan untuk dialog internasional mengenai bagaimana mengatasi kekurangan struktural yang jelas dari rezim kerjasama pembangunan Utara-Selatan yang ada. Salah satu poin utama dari proses ini adalah penerapan "Prinsip Paris" pada tahun 2005, yaitu. (i) kepemilikan prioritas pembangunan oleh negara-negara berkembang, (ii) fokus pada hasil, (iii) kemitraan inklusif, dan (iv) transparansi dan akuntabilitas timbal balik - untuk mempromosikan efektivitas bantuan.

Dialog pasca-Busan dilakukan melalui dua Pertemuan Tingkat Tinggi (HLM) yang berlangsung di Mexico City (2014) dan Nairobi (2016). HLF dan HLM ini memunculkan serangkaian perjanjian yang semakin bercita-cita untuk memperluas komitmen donor untuk kegiatan yang lebih baik, fokus pada prioritas yang ditentukan secara nasional, dan meningkatkan upaya untuk memantau dan memastikan hasil. Dalam hubungannya, negara-negara berkembang berkomitmen untuk mengambil kepemimpinan yang lebih kuat untuk memandu upaya donor dan memfasilitasi pendekatan untuk pembangunan (Keijzer & Lundsgaarde, 2016).

Saat ini, 161 negara, 56 organisasi telah mendukung prinsip-prinsip inti GPEDC.1 Badan pembuat kebijakan tertinggi GPEDC adalah pertemuan tingkat menteri yang biasanya dilakukan setiap tiga tahun. Di antaranya, GPEDC dipimpin oleh Komite Pengarah. Komite Pengarah GPEDC saat ini memiliki dua puluh satu anggota (termasuk negara penerima dan penyedia kerjasama pembangunan), lembaga keuangan internasional, Sistem PBB, sektor bisnis, perwakilan publik dan masyarakat sipil. Komite Pengarah memiliki tiga Kursi Bersama - masing-masing dari negara anggota OECD, penerima bantuan yang mengembangkan negara dan negara penyedia Kerjasama Selatan-Selatan.

GPEDC mengadopsi struktur multi-stakeholder untuk dirinya sendiri, digambarkan sebagai "*global-light and country-heavy*" dengan pertemuan tingkat tinggi setiap 18 hingga 24 bulan. Aktor yang tertarik diundang untuk bertemu dalam sembilan "*building blocks*" ("blok bangunan") untuk menangani masalah yang lebih konkret. Struktur baru ini dicanangkan oleh Komite Pengarah yang terdiri dari Inggris, Nigeria dan Indonesia sebagai ketua bersama, dan 15 anggota yang mewakili berbagai konstituensi. Keselanjutannya, negara anggota dapat memilih dan akan merotasi keanggotaan co-chair bilamana diperlukan. Tim dukungan

GPEDC terdiri atas negara anggota dan dipimpin oleh OECD dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Dalam hal ini Ketua Bersama non-eksekutif telah ditunjuk mewakili pemangku kepentingan non-pemerintah (mis. LSM dan OMS, anggota parlemen dan filantropi, sektor swasta dan serikat pekerja). Namun, masih harus dilihat bagaimana pemangku kepentingan non-pemerintah berencana untuk bekerja dalam kolaborasi dengan Co-Chairs lain untuk meningkatkan dampak GPEDC (Bena & Tomlinson, 2017). Cadangan teknis dan administratif GPEDC disediakan oleh Tim Dukungan Gabungan (JST) yang berlokasi di OECD (Paris) dan UNDP (New York).

Mengacu pada Komitmen Busan, GPEDC sendiri memiliki tujuan utama untuk membantu proses pembangunan di negara-negara berkembang dengan menyediakan *platform* untuk mempertemukan negara donor ataupun negara penerima bantuan.

Didirikannya GPEDC juga bertujuan untuk membantu negara anggota dalam bersama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses pembangunan. Tujuan ini kemudian diturunkan kedalam empat prinsip GPEDC yakni pertama, untuk mempercepat kepemilikan prioritas pembangunan oleh negara-negara berkembang dengan cara mempertemukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan (negara donor) dengan parlemen (negara penerima) untuk meningkatkan pengawasan kerja sama pembangunan dan memberdayakan pemerintah daerah untuk melokalisasi MDGs; mengembangkan dan mendukung strategi pembangunan nasional yang transparan, akuntabel dan inklusif dan mendorong penyelarasan mitra dengan strategi-strategi tersebut; memperkuat dan menggunakan sistem negara; meningkatkan harmonisasi penyedia kerjasama pembangunan; dan mendukung masuknya sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses pengadaan.

Kedua, untuk memperkuat fokus pada hasil, kemitraan yang terjadi di GPEDC selanjutnya akan mengembangkan lebih lanjut, mendukung dan menggunakan kerangka hasil tingkat negara dan sistem statistik nasional, dan menyesuaikannya untuk mencerminkan target dan indikator MDGs, serta untuk menghasilkan data terpilah untuk melaporkan kemajuan pembangunan. Ketiga, untuk mempromosikan kemitraan pembangunan yang inklusif, GPEDC akan meningkatkan upaya untuk memastikan lingkungan yang memungkinkan bagi semua kemitraan, di antara tindakan-tindakan lainnya. Keempat, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, GPEDC akan meningkatkan publikasi data terbuka tentang kerja sama pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Pembahasan

Millennium Development Goals atau MDGs sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas berawal dari munculnya keinginan negara dunia untuk membuat standar dan indikator yang harus terpenuhi pada tahun 2015. Para Kepala dan perwakilan sebanyak 189 negara melalui Pertemuan Persatuan Bangsa-Bangsa di New York tahun 2000 telah menyepakati Deklarasi *Millennium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium untuk menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat dunia.

Tujuan dalam MDGs mencakup: pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kemitraan global. Strategi pencapaian MDGs menempatkan manusia sebagai subyek sekaligus fokus utama pembangunan dan mengartikulasi pencapaian tujuan melalui agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dalam MDGs dijabarkan ke dalam satu atau lebih target melalui indikator pencapaian yang terukur.

Target-target ini berbicara tentang pemerataan pembangunan, pertumbuhan

e-issn: 2684-8082; Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (122-141) doi: 10.24198/padjir.v1i2. 26126

ekonomi, dan kemajuan sumber daya manusia. Indonesia sebagai negara penandatangan Deklarasi Millennium juga turut ambil andil dalam menjadikan MDGs sebagai indikator pembangunan. Kesepakatan MDGs menekankan kewajiban setiap negara untuk melaksanakan pembangunan mencapai MDGs dan komitmen negara maju untuk mendukung upaya pencapaian MDGs. Sebagai upaya pencapaian target-target MDGs, pemerintah Indonesia telah mengintegrasikan prioritas MDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2005-2009 dan 2010-2014), Rencana Pembangunan Tahunan Nasional (RKP), dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada awalnya Indonesia sendiri masih berhadapan dengan krisis finansial Asia yang berakibat pada melemahnya nilai tukar dan depresiasi ekonomi. Krisis finansial asia ini berimbas pada turunnya tingkat pembangunan nasional. Tahun 1999-2000 merupakan tahun transisi bagi pembangunan Indonesia. Banyak sekali permasalahan yang menjadi titik awal dari permasalahan pembangunan muncul sebagai dampak krisis finansial. Ketika awal ditandatanganinnya MDGs, Indonesia tidak secara langsung memasukkan MDGs kedalam rencana strategis pembangunan nasional. Namun diintegrasikan dengan program yang sudah terlebih dahulu muncul. Misalnya program Jaring Pengaman Sosial yang berfokus pada pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan pembangunan regional. Banyak program serupa dimunculkan oleh pemerintah untuk mempercepat dan memperbaiki sistem pembangunan nasional.

Barulah pada tahun 2004, Indonesia menyusun kembali RPJMN yang mencantumkan target MDGs. Pemerintah kala itu melihat bahwasanya ada sebelas tantangan dasar pembangunan yakni masalah-masalah dan tantangan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMN 2004-2009 meliputi: (1) tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, kesejahteraan masyarakat, dan berbagai masalah sosial lainnya, (2) kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah karena akses ke pendidikan berkualitas terbatas; (3) masalah perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam, yang sering menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan perlindungan lingkungan, (4) kesenjangan dalam pembangunan antar daerah sangat luas, seperti seperti antara Jawa dan luar Jawa, antara wilayah barat dan timur Indonesia, dan antara kota dan desa, (5) penurunan kualitas layanan dan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur telah menghambat pembangunan nasional, (6) ketidakstabilan sosial dan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas Republik Indonesia, (7) meningkatkan kejahatan domestik dan transnasional (8) mengingat negara ini tersebar, ancaman keamanan, baik domestik maupun eksternal, bersama dengan semua tantangan dalam mengelola keragaman dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh negara (9) undang-undang yang belum menghasilkan mempromosikan keadilan, keadilan, rasa hormat dan rotasi hak asasi manusia, (10) rendahnya tingkat pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai hasil dari penyalahgunaan wewenang serta sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak lagi mencerminkan situasi saat ini dan (11) lembaga politik yang lemah dan lembaga pelaksana negara.

Kesebelas tantangan ini kemudian menjadi titik fokus fase pertama pemerintah dalam mencapai target MDGs. Fokus ini diterjemahkan menjadi tiga poin utama tujuan pembangunan yakni (1) Terwujudnya Indonesia yang aman, (2) mempromosikan demokrasi dan keadilan, (3) meningkatkan kesejahteraan sosial. Poin utama ini yang menjadi komitmen awal pemerintah untuk menyelaraskan target pembangunan nasional dan MDGs.

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 kemudian menetapkan prioritas tujuan pembangunan yang berkeadilan berpihak pada pencapaian MDGs. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Peta Jalan (*Road Map*) pencapaian MDGs dan Bappenas bersama Bappeda melakukan fasilitasi percepatan pencapaian MDGs melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs di setiap daerah. Masuknya MDGs sebagai indikator pembangunan ini sesuai dengan pengertian pembangunan sendiri seperti yang diungkapkan oleh Portes (1976) mendefinisikan pembangunan (*development*) sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan nasional adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat ke arah yang diinginkan, melalui kebijakan, strategi dan rencana. Pendapat lain menjelaskan pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu perubahan *(change)*, dan keberlanjutan *(continuity)*. Tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat (Djojonegoro,1996).

MDGs sebagai indikator pembangunan global kemudian dijadikan oleh pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004. Rujukan pembangunan ini kemudian membawa perubahan (*change)* dalam haluan pembangunan nasional. Perubahan ini merupakan wujud atas adanya upaya penyelarasan RPJMN dengan MDGs dan pelaksanaan guna mencapai target MDGs di daerah. Perubahan-perubahan yang ada kemudian menerima beberapa hambatan di lapangan terutama ketika MDGs diturunkan ke ranah daerah. Masalah yang timbul kemudian dihadapi dengan berbagai upaya salah satunya adalah dengan mengadakan kerja sama pembangunan Internasional.

Lebih lanjut, MDGs sebagai indikator pembangunan nasional memberikan banyak sekali input untuk pembangunan Indonesia. Hal ini turut membantu Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan krisis finansial Asia, menstabilkan harga, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. MDGs sendiri sebenarnya baru menjadi fokus pemerintah setelah tahun 2010 dengan dikeluarkannya Inpres No. 3 Tahun 2010 yang kemudian menjadi awal upaya pemerintah untuk membentuk sekretariat nasional MDGs. Dalam wawancara peneliti dengan Khairanis Rahmanda Irina sebagai Assistant Executive Secretary di Sekretariat Nasional MDGs dikatakan bahwa sebelum tahun 2010, pengordinasian MDGs tidak berada pada satu pintu melainkan tersebar kedalam banyak *stakeholder* terkait seperti kementerian dan parlemen. Hal ini kemudian menyebabkan sulitnya terjadi proses *monitoring* dan evaluasi MDGs secara terpusat. Bappenas kala itu tidak mengeluarkan laporan perkembangan MDGs secara terstruktur.

Inpres No. 3 Tahun 2010 kemudian membuat sistem satu pintu dalam hal koordinasi MDGs berupa didirikannya sekretariat nasional. Dengan adanya sekretariat nasional ini, mereka bertugas untuk membuat pedoman teknis yang bersifat general maupun spesifik yang menargetkan tiap-tiap indikator pembangunan. Pedoman teknis ini merupakan wujud menyatukan informasi terkait MDGs dari pusat hingga daerah. Pada perjalannya, hambatan terbesar dalam upaya pemerintah menyelaraskan MDGs sebagai indikator pembangunan muncul pada upaya membawa MDGs dalam tingkat yang lebih kecil yakni tingkat daerah. Sebagai indikator pembangunan nasional, MDGs tentunya membuat pemerintah mengeluarkan berbagai upaya untuk menyelaraskan MDGs dengan indikator pembangunan. Pemerintah dalam hal ini mendirikan Sekretariat Nasional MDGs bekerja sama dengan UNDP. Dibentuknya sekretariat nasional MDGs memiliki peranan sebagai *monitoring* dan evaluasi perkembangan MDGs di Indonesia.

e-issn: 2684-8082; Vol. 1 No. 2, Agustus 2019 (122-141) doi: 10.24198/padjir.v1i2. 26126

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Assistant Country Director UNDP Irman G. Lanti, didapatkan informasi mengenai upaya pemerintah yang berkoordinasi dengan UNDP dalam mendirikan sekretariat nasional MDGs. Sekretariat Nasional dalam hal ini terdiri dari berbagai lembaga pemerintah seperti Bappenas dan kementerian yang terkait dengan MDGs dan UNDP. Terdapat perbedaan peranan antara pemerintah dan UNDP. Pemerintah dalam hal ini bersifat pelaksana dan eksekutor berupa pengeluaran kebijakan. UNDP dalam hal ini lebih bersifat sebagai penyokong sekretariat nasional bahkan UNDP bertanggung jawab untuk memberikan pembiayaan terhadap kinerja sekretariat nasional oleh karenanya, UNDP lebih bersifat *national implementation model*. Kemudian memonitor dan mengevaluasi ketercapaian MDGs melalui *Human Development Report (HDR)* yang dikembangkan oleh UNDP.

Pada awal diterapkannya MDGs, HDR berfokus kepada pembangunan manusia secara umum dan pengentasan kemiskinan secara khusus. Lebih lanjut, Seknas MDGs kemudian memiliki *Provincial Development Reports*. Yang berfungsi untuk memberikan arahan dan monitoring serta evaluasi pencapaian MDGs di provinsi. Motif sebagai dorongan untuk mencapai sebuah tujuan mampu membawa dua entitas berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula untuk bersama bekerja sama. Sri Mulyani Martaniah (1982) dalam Sarwono (2002) menjelaskan bahwa setiap interaksi yang terjadi terdorong oleh sebuah konstruksi yang sifatnya potensial dan laten, dorongan ini relatif dapat bertahan namun berpotensi untuk berubah seiring dengan terpenuhinya harapan serta insentif yang didapatkan. Selama kepentingan UNDP dan Indonesia masih beririsan dan saling mengikat, keduanya memiliki motif yang kuat untuk bekerja sama dalam hal berjalannya sekretariat nasional MDGs.

Dalam upayanya membawa MDGs ke tingkat daerah, menurut Khairanis Rahmania, terdapat *step-by-step mechanism* yang dibawa oleh pemerintah pusat ke daerah. Mekanisme ini berawal dari adanya Instruksi presiden, yang kemudian dituangkan ke dalam RPJPN, diadopsi ke dalam RPJMN, kemudian diturunkan ke RPJMD. Dalam hal MDGs, untuk membantu proses pemantauan dan penyelarasan dibentuk pula RAD atau Rencana Aksi Daerah. Yakni berupa program-program besutan daerah yang mengacu pada indikator MDGs yang disesuaikan dengan RPJMD. Dalam pelaksanaannya, negara masih sangat berperan dalam program-program MDGs. Negara kemudian bertindak sesuai dengan RPJMN yang dibentuk selaras dengan MDGs. Kenyataannya, negara masih banyak membutuhkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari MDGs. Hambatan ini muncul karena ketidakmampuan pemerintah untuk menurunkan target indikator nasional ke tiap-tiap daerah.

Munculnya hambatan tersebut tidak lepas dari banyaknya hal yang terjadi di lapangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya negara masih memainkan peranan yang cukup dominan dalam pengaplikasian MDGs. Dominansi negara dalam MDGs menyebabkan beberapa kesalahan-kesalahan kecil luput dari pantauan negara.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan UNDP, kebanyakan kesalahan atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan MDGs berada pada ranah koordinasi, komunikasi, dan promosi. Koordinasi misalnya, Sering sekali terjadi kasus dimana data yang dimiliki oleh pusat dan data yang dimiliki oleh daerah berbeda dan terdapat agregasi yang sangat besar. Dalam kasus *stunting* dan angka kematian ibu misalnya, terdapat perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang ditawarkan pun berupa data lama yang telah lama tidak diperbaharui. Ketidaksinkronan data menyebabkan terhambatnya proses monitoring dan evaluasi progres pencapaian MDGs.

Dalam hal komunikasi permasalahan yang paling menonjol adalah tidak dilibatkannya masyarakat sipil dalam setiap jalan MDGs. Masyarakat banyak yang tidak acuh terhadap MDGs bahkan masih awam. Hal ini tentunya menyulitkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang efisiennya penyampaian pemerintah yang bertolak belakang dengan tujuan MDGs itu sendiri yakni untuk menjangkau dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Kala itu, belum diterapkan sistem *Voluntary National Review* untuk melihat sudah sejauh mana MDGs dijalankan.

Dalam hal sinkronisasi data, BPS saat itu tidak menjalankan fungsinya dengan efisien. Belum ada skema *target setting* yang kemudian mengulas sejauh mana MDGs sudah tercapai dan belum tercapai di tingkat daerah. Hal ini searusnya dilakukan untuk melihat daerah mana yang memiliki tingkat ketercapaian tinggi. Selain itu, penggunaan cara ini dapat mengakibatkan sinkronnya data dari daerah hingga ke pusat. Disisi lain, MDGs sebagai indikator masih merupakan indikator yang umum dengan tidak adanya rincian target yang spesifik. Hal ini kemudian menyulitkan peranan pemerintah nasional secara kesuluruhan.

Apabila dalam hal indikator, masalah yang krusial untuk pemerintah adalah dalam mengurangi angka kematian ibu. Tingkat kematian ibu bervariasi mencolok menurut wilayah, tetapi besaran absolut kematian ibu di suatu wilayah juga ditentukan oleh jumlah kelahiran hidup atau jumlah penduduk. Data tahun 2010 menunjukkan lima provinsi termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Banten mempunyai jumlah kematian ibu terbesar dengan kontribusi 52% dari total kematian ibu di Indonesia. Sedangkan data pada tahun 2014, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara berkontribusi 50% total kematian ibu. Dalam tahun 2010-2014 terjadi pergeseran penyumbang terbesar kelima kematian ibu dari NTT ke Sumatera Utara. Penurunan kematian ibu di NTT mungkin terkait dengan kebijakan Revolusi KIA yang melalui Program Sister Hospital yang dilaksanakan di sebagian besar kabupaten dan kota di NTT.

Fakta bahwa separuh kematian ibu terjadi di lima provinsi mengundang perhatian untuk perencanaan prioritas percepatan penurunan AKI. Penurunan AKI di provinsi dengan banyak kematian ibu akan menurunkan AKI nasional secara signifikan. Namun demikian, provinsi lain terutama yang mempunyai banyak daerah dengan akses pelayanan yang terbatas perlu pula diperhatikan. Untuk mengatasi hambatan terkait angka kematian ibu, pemerintah melakukan strategi *knowledge sharing* dengan berbagai pihak. Hasil *knowledge sharing* yang diperoleh oleh pemerintah menjadi katalisator pemerintah dalam membentuk *MDGs Acceleration Framework*. MAF ini kemudian membantu memetakan masalah dan mengidentifikasi masalah secara spesifik untuk menemukan hambatan yang menjadi *bottleneck* dalam hal pencapaian target MDGs.

Hambatan yang terjadi dalam pengaplikasian MDGs ini menyebabkan sulitnya terjadi kenaikan tingkat ketercapaian MDGs di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah berusaha untuk menemukan penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Dalam berbagai hal, pemerintah kemudian melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan mengadopsi strategi *knowledge sharing* hal ini digunakan untuk membantu pemerintah untuk mencari titik terang atas permasalahan MDGs yang terjadi.

Untuk menyelesaikan hambatan pembangunan diatas, pemerintah Indonesia kemudian melakukan beberapa tindakan. Yakni berupa kerja sama dengan negara lain ataupun pihak lain. Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia melakukan kerja sama dengan UNDP untuk berkoordinasi terkait dengan monitoring dan evaluasi MDGs. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak ini lebih bersifat kerja sama fungsional. Kerja sama yang dilakukan untuk memenuhi fungsi dan kebutuhan kedua pihak.

Lebih jauh, Indonesia juga melakukan kerja sama secara multilateral dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah *Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)*. Salah satu keterlibatan penting Indonesia dalam lingkup global adalah dalam forum GPEDC (*Global Partnership for Effective Development Cooperation*). GPEDC dibentuk sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Busan *Outcome Document* yang merupakan hasil dari the 4th *High Level Forum* (HLF- 4) *on Aid Effectiveness* di Busan, Korea Selatan pada tahun 2011. Forum GPEDC merupakan forum inklusif baru yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan pembangunan (development stakeholder) yang berkomitmen untuk mendorong efektifitas kerja sama pembangunan dan berorientasikan pada pencapaian hasil. Indonesia dalam hal ini terlibat langsung diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Armida Alisjahbana.

GPEDC seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya adalah *platform* yang dapat digunakan negara anggota untuk saling bantu-membantu dalam peningkatan pencapaian MDGs. Dalam hal *knowledge sharing*, hal ini sesuai dengan teori bentuk kerja sama multilateral Peter A. Toma dan Robert F. Gorman menjelaskan terdapat setidaknya empat motif/alasan terbentuknya suatu kerja sama dalam hubungan internasional, yaitu (Toma dan Gorman, 1991, hlm. 385 386) salah satunya adalah Mengutamakan kepentingan pribadi. Secara khusus setiap negara menggunakan kerja sama dengan aktor lain untuk menyukseskan kepentingan nasional masing masing negara. Kondisi ini mengandalkan keadaan kepentingan timbal balik antar aktor. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia di GPEDC, Indonesia mengharapkan timbal balik dengan tema *knowledge sharing* yang mana difokuskan oleh Indonesia ketika Indonesia menjadi *co-chair* dalam sidang HLF GPEDC.

Masuknya Indonesia dalam GPEDC menandakan dua hal, yang pertama, GPEDC merupakan salah satu *platform* kerja sama pembangunan internasional yang paling awal diikuti oleh Indonesia. Masuknya Indonesia dalam GPEDC kemudian menjadi katalisator untuk munculnya organisasi bantuan luar negeri yang serupa dalam bidang pembangunan. Yang kedua, masuknya Indonesia di GPEDC menandakan titik awal masuknya *non-state actor* seperti NGO untuk ikut ambil andil dalam menyukseskan indikator MDGs.

Salah satu tugas yang diberikan kepada GPEDC adalah guna untuk membantu pengembangan *Knowledge Sharing* dan *lessons learned* untuk memfasilitasi penyelesaian hambatan pembangunan terutama dalam membantu pencapaian Development Goals (baik MDGs, maupun Post-2015). Isu *Knowledge Sharing* sebenarnya telah sejak dahulu menjadi isu yang dibahas dalam forum internasional seperti G20, UNDCF, dan GPEDC, namun belum dapat dihasilkan suatu mekanisme yang terstruktur dan dapat digunakan dengan mudah pada tingkat negara (*country level*) untuk peningkatan kapasitas dalam mengatasi persoalan pembangunan.

Dalam wawancara peneliti dengan Agustaviano Sofjan, Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia didapatkan informasi bahwa, dalam forum GPEDC, Indonesia secara khusus mengangkat inisiatif *Knowledge Sharing* sebagai aktualisasi konsep *Beyond Aid*. Indonesia berpendapat bahwa *Knowledge Sharing* merupakan instrumen penting guna meningkatkan efektivitas pembangunan, melalui pembelajaran *best practice on development*, baik yang bersifat internasional, yaitu dari negara maju kepada negara berkembang atau antar sesama negara berkembang, serta dalam kerangka peningkatan kapasitas di dalam negeri, yaitu dari tingkat pusat kepada tingkat daerah, ataupun pertukaran pembelajaran dari sesama tingkat daerah.

Indonesia berpendapat bahwa diperlukan adanya mekanisme *knowledge sharing* yang lebih terstruktur dengan baik yang dapat mempertemukan kebutuhan dan penyediaan dari *best practices (supply-demand*), yang memadai untuk dipakai oleh suatu negara (*best fit*) yang diseuaikan dengan karakteristik yang terdapat pada masing-masing negara anggota. Kemudian daripada itu, mekanisme terstruktur dapat digunakan untuk membantu perkuatan kapasitas pemerintah daerah yang luas (dalam konteks kebutuhan Indonesia yang mempunyai banyak pemerintah daerah). Untuk menyiapkan mekanisme *Knowledge Sharing* yang lebih terstruktur Indonesia menyiapkan pengembangan konsep *Country Led Knowledge Hub (CLKH)*, dengan beberapa komponen utama, yaitu: (i) mengacu pada *thematic area* pembangunan paska 2015; (ii) menyiapkan mekanisme *brokering supply* dan *demand*; (iii) infrastruktur CLKH, dan (iv) optimalisasi skema pendanaan.

Dalam konteks kebijakan Luar Negeri sejatinya mendukung tercapainya kepentingan nasional. Sebagaimana terangkum pada bab dua, Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan (Jemadu, 2008, p. 65).

Agustaviano Sofjan dalam wawancaranya mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tahun 2000-2015 berfokus kepada mendukung laju pembangunan Indonesia. Setelah sebelumnya dilanda krisis finansial Asia, kebijakan luar negeri kemudian menjadi wujud komitmen pemerintah untuk mendukung pembangunan. Misalnya berupa kerja sama pembangunan internasional. Dalam kerja sama pembangunan internasional, kebijakan luar negeri kemudian berperan untuk membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.

Penyelesaian masalah pembangunan ini menurut Agustaviano Sofjan diwujudkan dalam rupa bantuan luar negeri, kerja sama dan *partnership*, serta *knowledge sharing*. Salah satu *platform* yang kemudian memfasilitasi adanya penyelesaian masalah pembangunan adalah *Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)*. Prinsip *bebas-aktif* kebijakan luar negeri Indonesia kala itu kemudian memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama ataupun menjalin hubungan baik dengan banyak negara. Ditambah adanya strategi kebijakan luar negeri "*A Million Friends and Zero Enemies"* yang digulirkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat Indonesia secara aktif mengadakan kerja sama pembangunan dalam berbagai bidang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya prinsip ini memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan berbagai hal, termasuk di dalamnya bekerja sama dengan GPEDC. Dalam bekerja sama di GPEDC Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif dan dikemudian hari menjadi *co-chair High Level Forum* di Bali menggunakan prinsip bebas-aktif untuk memunculkan konsep kerja sama selatan-selatan dan kerja sama triangular (*south-to-south and triangular cooperation)* dalam *platform* kerja sama GPEDC yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip utama GPEDC yang dikemudian hari menimbulkan masalah antara negara donor dan negara penerima donor utara dan selatan. Serta memunculkan skema *knowledge sharing*.

Melihat hal tersebut, aktifnya Indonesia dalam strategi *knowledge sharing* di GPEDC memiliki *output* tersendiri yakni, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, Indonesia menyiapkan pengembangan konsep *Country Led Knowledge Hub (CLKH)*, dengan beberapa komponen utama, yaitu: (i) mengacu pada *thematic area* pembangunan paska 2015; (ii) menyiapkan mekanisme *brokering supply* dan *demand*; (iii) infrastruktur CLKH, dan (iv)

optimalisasi skema pendanaan. *Knowledge sharing* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kemudian digunakan sebagai strategi dalam menyelesaikan masalah pembangunan. Dengan adanya skema *knowledge sharing*, Indonesia dapat menyerap ilmu serta cara penyelesaian yang dilakukan oleh negara lain ketika mendapat hambatan dalam pembangunan.

Rosenau dalam Dugis (Dugis, 2007, p. 41) memahami kebijakan luar negeri sebagai tindakan otoritas pemerintah yang dilakukan untuk mempertahankan hal yang diinginkan atau merubah hal yang tidak diinginkan dari lingkungan internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri berorientasi pada tujuan nasional yang mampu mempengaruhi suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu entah melalui respon secara resmi maupun tidak resmi. Politik luar negeri selalu dilandasi oleh kepentingan nasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional negara-bangsanya (Wicaksana, 2007, p. 20).

Dengan adanya kerja sama pembangunan internasional, pemerintah Indonesia lantas menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk mendorong pembangunan dengan skema *knowledge sharing* hal ini didasarkan pada dorongan terhadap pencapaian target MDGs di Indonesia. Sesuai dengan konteksnya, kebijakan luar negeri kemudian digunakan untuk mendukung kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan teori Jemadu yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri sejatinya digunakan untuk mendukung kepentingan nasional. Dalam hal ini, MDGs berperan sebagai faktor kepentingan nasional berupa pembangunan nasional. Yang kemudian menjadi poin strategi kebijakan luar negeri dalam kerja sama pembangunan internasional yang difasilitasi oleh *knowledge sharing*.

Seperti dijelaskan sebelumnya *knowledge sharing* merupakan proses pembagian informasi. Dalam pembangunan, proses ini dapat berarti membagi informasi seputar upaya pembangunan. Termasuk di dalamnya berbagi tentang solusi atau upaya aktif dalam mengatasi hambatan pembangunan. Bergabungnya Indonesia dalam GPEDC kemudian memudahkan Indonesia untuk berbagi informasi terkait pembangunan dengan negara lain. Dalam wawancaranya, Khairanis mengatakan bahwa *knowledge sharing MDGs* sifatnya lebih formal berbentuk presentasi dan konferensi antar negara yang memasukkan tema atau topik tertentu yang bersifat tematik pada masing masing MDGs. *Knowledge sharing* juga didasari pada komitmen bersama antar negara. *Knowledge sharing* juga bersifat resiprokal. Suatu negara dapat memberi ataupun menerima ide terkait dengan pembangunan.

Dalam GPEDC Indonesia melakukan strategi knowledge sharing Sejak 2013, Indonesia telah menyiapkan sebuah inisiatif dari berbagi pengetahuan terkait pembangunan melalui *Global Partnership for Effectiveness Development and Cooperation* (GPEDC), yang kemudian bertujuan untuk untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran yang nantinya akan diimplementasikan ke negara-negara berkembang. Lebih lanjut, menurut bappenas, perlunya dilakukan pengembangan proses pembagian pengetahuan dan *Country Led Knowledge Hubs* (CLKH), Bappenas berusaha untuk membangun *Knowledge Center* (KC) yang merupakan sebuah sentral repositori yang terpusat, dinamis dan terintegrasi untuk informasi, pengetahuan, dan praktik-praktik terbaik di bawah Bappenas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan berbasis pengetahuan. KC memiliki fungsi sebagai penyedia (broker) pengetahuan dan solusi serta sebagai pusat pembelajaran (*learning*) melalui kumpulan *(stock of) lessons learned*, publikasi, dan praktik-praktik cerdas (Bappenas,2013). KC bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan nasional dan daerah berbasis bukti dalam rangka meningkatkan pembangunan melalui *knowledge sharing* dan *lesson learned* yang dapat

memberikan solusi yang mudah diadopsi oleh negara lain.

Dari kedua program tersebut, penggunaan *knowledge sharing* dapat menjadi strategi yang efektif dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa, kerja sama pembangunan internasional yang dilakukan oleh Indonesia di GPEDC merupakan wujud upaya pemerintah untuk menyelesaikan hambatan pembangunan dan mendukung kepentingan nasionalnya

KESIMPULAN

Sebagai salah satu negara yang berkomitmen dalam menjalankan *Millennium Development Goals (MDGS),* Indonesia kemudian menjadikan MDGs sebagai salah satu indikator target pembangunannya. Pemerintah telah secara spesifik mengkategorikan pembangunan berdasarkan target dan indikator dari kedelapan poin MDGs dengan cara memasukkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Komitmen pemerintah Indonesia ini kemudian dibarengi dengan didirikannya Sekretariat Nasional MDGs yang didirikan atas dasar kerja sama dengan *United Nations Development Programme (UNDP).* Sekretariat ini berfungsi untuk mengawasi, memonitor, dan memberikan arahan terkait ketercapaian target MDGs.

Bersamaan dengan hal tersebut, tentunya dalam pelaksanaanya Indonesia memiliki keterhambatan dalam mencapai beberapa target. Terdapat banyak masalah terkait dengan penerapan indikator pembangunan nasional kedalam indikator pembangunan daerah. Dalam hal ini, pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu Indonesia dalam mencapai target MDGs. Salah satu kerja sama yang dilakukan Indonesia adalah masuknya Indonesia dalam skema kerja sama *Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)* melalui HLF Busan 2011.

GPEDC pada awalnya berfungsi sebagai *platform* yang berfungsi untuk mempertemukan negara donor dan negara penerima bantuan luar negeri. GPEDC kemudian memfasilitasi kerja sama multilateral dari pihak-pihak yang ingin bermitra. Namun seiringan dengan perjalanannya, terdapat perubahan fokus GPEDC sebagai platform bergantung pada negara yang memegang jabatan sebagai co-chair GPEDC. Indonesia ketika tahun 2011 diberikan kesempatan untuk menjadi *co-chair* GPEDC sebagai perwakilan dari negara ekonomi berkembang. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu progres ketercapaian MDGs di Indonesia melalui kebijakan *knowledge sharing.* Kebijakan *knowledge sharing* didukung oleh kebijakan luar negeri Indonesia yang kala itu menganut prinsip bebas-aktif memungkinkan pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara berkembang untuk bersama-sama memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam penerapan MDGs. Hal ini memberikan ruang untuk munculnya *south-to-south and triangular cooperation* dalam GPEDC.

Disamping hal tersebut, Indonesia ternyata mampu menerapkan hasil yang didapat dari kebijakan *knowledge sharing* untuk memberikan kemajuan terhadap ketercapaian MDGs. Kendati banyak kekurangannya, Indonesia telah berhasil menjadi pionir dalam hal kesuksesan MDGs terbukti dari keberhasilan Indonesia dalam *knowledge sharing* dengan berbagai negara di dunia untuk membantu perkembangan ketercapaian target MDGsnya. Hal ini yang kemudian tentunya menjadi pengalaman berharga Indonesia dalam kerja sama pembangunan, dan sudah menjadi modal tersendiri untuk melanjutkan ke SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, T., & Thomas, A. (2000). *Poverty and Development Into the 21st Century* (2nd Editio). Oxford University Press.

Alwasilah, A. C. (2002). *Pokoknya Kualitatif* (5th ed.). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Amstutz, M. R. (1999). *International Ethics:*

Concepts, Theories, and Cases in Global Politics.
Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
Budiardjo, M. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
Dugis, V. (2007). *Analysing Foreign Policy*.
Fielden, M. B. (1998). The Geopolitics of Aid: The Provision and Termination of Aid to Afghan Refugees in North West Frontier Province, Pakistan. *Political Geography*, *17*(4), 467–475.
Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness. (2011). BUSAN PARTNERSHIP FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT CO- - - OPERATION, (December).
Holsti, K. J. (1985). *The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory*. Boston.
Holsti, K. J. (1988). *International Politics a Framework of Analyisis*.
Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori dan Praktik*.
Ratner, C. (2012). *Cooperation, Community, and Co-Ops in a Global Era*.
Saith, A. (2006). From Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation. *Development and Change*, *37*(5), 1167–1199.
Sarwar, M. B. (2015). National MDG implementation: Lessons for the SDG Era, (November), 1–22. Retrieved from http://www.odi.org/publications/10106-mdg-sdg-national-policy-priority-lessons%5Cnhttp://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10003.pdf
Schneider, G. (2003). *The Domestic Roots of Commercial Liberalism: A Sector-Specific Approach. Globalization and Armed Conflict*.
Tarp, F. (2000). *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future*. London: Routledge.
Toma, P. A., & Gorman, R. F. (1991). *International Relations: Understanding Global Issues*.
UN. (2000). United Nations Millennium Declaration A/55/L.2. New York, NY: United Nations, (September). https://doi.org/0055951
United Nations. (2001). Framework on Millennium Development Goals, *52607*(September), 1–58.
Wicaksana, I. G. W. (2007). Epistemologi Politik Luar Negeri: 'A Guide to Theory. *Jurnal Global Dan Strategis*, *1*(01), 12–19.
Yin, R. K. (2011). *STUDY Design and Methods*. New York: The Gullford Press.

BIOGRAFI

Reyhan Muhammad Fachry adalah seorang penstudi hubungan internasional yang berfokus pada studi pembangunan diplomasi dari Universitas Padjadjaran.

Dudy Heryadi adalah seorang pengajar dan penggiat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran